



Judul : Butuh Modal untuk Pengadaan Armada  
Tanggal : Jumat, 03 September 2021  
Surat Kabar : Kompas  
Halaman : 10

# Butuh Modal untuk Pengadaan Armada

Penyertaan modal negara akan dijadikan sebagai cadangan untuk penyediaan armada bagi Garuda Indonesia atau Citilink. Ini bertujuan mengantisipasi lonjakan penumpang.

JAKARTA, KOMPAS — Holding Badan Usaha Milik Negara Pariwisata dan Pendukung membutuhkan penyertaan modal negara sebesar Rp 3 triliun untuk investasi penyediaan *fleet* atau armada bagi maskapai milik negara. Investasi itu guna mengantisipasi potensi "terkatung-katung"-nya sekitar 20 jutaan penumpang pascapulihnya industri penerbangan yang diperkirakan mulai terjadi pada pertengahan 2022.

Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung atau PT Aviaria Pariwisata Indonesia (Persero) mengajukan penyertaan modal negara (PMN) tahun 2022 Rp 9,3 triliun. Namun, dalam proses pembahasan, PMN itu berkurang jadi Rp 7,5 triliun.

Dana PMN itu salah satunya akan digunakan untuk investasi ketersediaan armada bagi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan anak perusahaannya, PT Citilink Indonesia, senilai Rp 3 triliun. PMN itu juga akan digunakan untuk penguatan modal *holding* Rp 400 miliar, pembangunan destinasi wisata Indonesia timur Rp 1 triliun, pengembangan ekspor produk usaha kecil menengah oleh PT Sarinah (Persero) Rp 100 miliar, dan dukungan proyek-proyek strategis nasional PT Angkasa Pura I (Persero) Rp 2 triliun.

Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat dengan Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung di Jakarta, Kamis (2/9/2021). Rapat itu dihadiri Direktur Project Management Office (PMO) Hol-

ding BUMN Pariwisata dan Pendukung Edwin Hidayat.

Edwin mengatakan, PMN senilai Rp 3 triliun itu merupakan dana cadangan untuk investasi penyediaan armada bagi Garuda Indonesia atau Citilink guna mengantisipasi lonjakan penumpang pesawat saat pemulihan mulai terjadi. Berdasarkan proyeksi Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA), penerbangan domestik Indonesia diperkirakan mulai pulih pada pertengahan 2022.

Pemulihan ini akan berpengaruh pada permintaan atau lonjakan jumlah penumpang dan suplai armada pesawat. Dari sisi suplai, banyak maskapai, termasuk Garuda Indonesia, yang kondisi keuangannya memburuk imbas pandemi Covid-19. Perusahaan mengembalikan pesawat kepada *lessor* (perusahaan jasa sewa guna).

"Jika kekurangan pesawat tak diatasi, bisnis penerbangan dan pariwisata akan terpengaruh, dan lambat pulih. Tim internal kami memperkirakan, 19 juta penumpang tidak terlayani pada 2022 dan 25 juta penumpang pada 2023 karena banyak pesawat yang sudah dikembalikan ke *lessor*," ujarnya.

## Jadi catatan

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohammad Hekal dan anggota Komisi VI DPR, Evita Nursanty, mempertanyakan apakah dana PMN Rp 3 triliun itu benar-benar bisa digunakan untuk investasi armada ke Ga-

ruda Indonesia. Pasalnya, restrukturisasi Garuda diperkirakan tuntas pada 2023.

Mereka juga mempertanyakan apakah Citilink, sebagai anak perusahaan Garuda, turut masuk dalam *holding*. Hal ini akan dijadikan catatan untuk dialami kembali dan dibahas bersama Menteri BUMN.

Sementara itu, dalam seminar virtual "Penyertaan Modal Negara antara Kepentingan Sosial dan Finansial" yang digelar Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Kamis, Kementerian BUMN menekankan pentingnya PMN untuk menopang pemulihan ekonomi dan memperkuat keuangan perusahaan-perusahaan negara.

Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nawal Nely menuturkan, perusahaan-perusahaan BUMN berperan penting dalam perekonomian. Jumlah aset konsolidasian 108 BUMN saat ini Rp 8.300 triliun.

Sepanjang 2011-2020, total PMN yang diterima Rp 147 triliun. Total kontribusinya Rp 3.295 triliun, terdiri dari setoran dividen ke negara Rp 388 triliun, pajak Rp 1.872 triliun, dan penerimaan negara bukan pajak Rp 1.035 triliun.

"Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara ini jauh di atas total PMN yang diterima. Meski dalam kondisi pandemi, kami menargetkan kontribusi dividen sebanding dengan PMN yang didapat, yaitu dengan porsi 50:50 pada periode 2020-2024," ujarnya.

(HEN)